

# **Pemahaman Baru Globalisasi: Tantangan Politik Abad Ke-21**

**Ranny Emilia**

*Pengajar Ilmu Hubungan Internasional  
Universitas Andalas  
(E-mail: eranny258@yahoo.co.id)*

## **ABSTRACT**

*As a political project, globalization enhances the idea of strategic cultures for borderless world. Society perceived as sets of elements, communities, groups, even individuals assemble in equality. Yet, there are paradoxes as injustice and violence are ongoing in the century. I try to revisit whether or not the ideas form the understanding about globalization is in coherence with prevailing circumstances. I argue we need a new set of understanding about the nature of globalization entering the 21<sup>st</sup> century.*

**Keywords:** *globalization, sovereignty, normative power*

Politik global adalah satu jaringan dan jejaring yang kompleks dari bermacam-macam agen, negara dan non negara, yang membentuk struktur yang tidak penuh, memiliki kedekatan, juga konflik satu sama lainnya. Sementara struktur itu sendiri tidak lain adalah sebuah konteks sosial yang dapat berubah bentuk, diperbaharui, hilang atau muncul kembali, tergantung pada luas pemakaian atas ide-idenya. Struktur bukanlah sebuah agregat kepentingan rasional yang stabil dan tumbuh secara linier. Struktur meliputi satu set ide tentang peranan, fungsi dan nilai-nilai yang diterima dan dijalankan. Struktur menjadi kelaziman karena banyak yang mempercayai bahwa memang itulah yang ada pada struktur itu. Setiap pengetahuan tentang struktur politik global harus dipelajari dari ide-ide yang menghubungkan elemen-elemennya yang kompleks secara lintas nasional dan memiliki kesalingterkaitan satu sama lainnya.

Tulisan ini menggambarkan bagaimana struktur politik global dibentuk dan membentuk nilai-nilai pada aktornya dan implikasi-implikasinya terhadap perilaku subjek-subjeknya yang nyata, yakni manusia, seperti yang sering digambarkan dalam globalisasi. Dalam rangka menunjukkan tantangan-tantangan yang dihadapi, dalam tulisan ini dijelaskan hubungan dialektik antara isu-isu normatif yang hendak dipecahkan dan jalan yang dipilih untuk mengatasinya. Sebagai sebuah proyek politik, globalisasi memunculkan problematika karena terus mengundang konflik dan perang. Kategori yang memberikan akibat-akibat yang berbeda pada penerapan-penerapan praktisnya adalah ide-ide tentang masyarakat global. Sebagai sebuah bentuk kekuasaan normatif, dibutuhkan kesepahaman baru tentang isi yang terpenting dari masyarakat global. Ketidaksejajaran dalam meletakkan kekuasaan agen-agennya dan jalur-jalur yang dipilih untuk sampai kepada penerimaan itu merupakan kendala untuk mencapai masyarakat global yang damai.

### **Paham Kedaulatan**

Setiap penilaian tentang politik global untuk jangka panjang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh ide-ide yang dikembangkan dalam filsafat politik Barat. Secara tipikal para pemikir di masyarakat ini meyakini sifat dasar dari dunia sosial menghasilkan bayangan manusia dimana terdapat keadaan yang anarki dalam kehidupan individu-individu dan individu-individu tersebut tidak mampu menerima ancaman sosial pada level yang tinggi. Ketakutan akan ancaman dan ketidakmampuan menerima kekacauan menjadi motif utama individu-individu untuk mengorbankan sebagian kebebasan, dengan tujuan menaikan tingkat keamanan, dan pada proses inilah pemerintah dan negara muncul. Kerjasama multilateral juga dimunculkan dalam pemikiran tentang sifat alami, namun dengan penekanan-penekanan yang kuat pada tujuan-tujuan rasional manusia. Anarki, egoisme, *self interest* adalah konsep-konsep yang hampir selalu muncul untuk menjelaskan hubungan antar manusia maupun antar negara-negara (Hoffman 1999).

Berdasarkan pandangan tentang sifat alami manusia, individu-individu berada dalam kumpulan-kumpulan untuk mempertahankan diri dari serangan pihak lain dan mengamankan kepentingannya, termasuk keamanan atas harta benda dan semua yang diakui sebagai hak-hak milik pribadinya. Pemahaman ini yang paling banyak dan paling sering dipakai untuk menerangkan perilaku manusia dan negara-negara. Pendekatan konflik menjadi suatu yang tak terelakkan, berdasarkan pemahaman tentang sifat alami, dan pada akhirnya akan diselesaikan melalui perang. Realisme adalah salah satu aliran pemikiran yang menyumbang besar dalam menyebarkan pengetahuan ini. Secara khusus realisme memberi perhatian kepada kekuatan persenjataan yang bisa mengakibatkan kerusakan

massal. Mereka meyakini negara-negara yang menguasai persenjataan lebih suka damai ketimbang perang karena perang akan menghancurkan diri sendiri (Waltz 1979; Morgenthau 1985; Stephen Krasner 1988, 1999; Gilpin 1991; Buzan 1991; Mearsheimer 2001).

Sarjana realisme yang memberi perhatian kepada masalah-masalah kekerasan dan perang umumnya memulai studinya dengan bertanya mengapa berbagai negara yang berbeda, bahkan bertentangan secara ideologis, berperilaku sama, saling berebut pengaruh dan kekuasaan. Sementara realisme juga menyadari bahwa perlombaan persenjataan dalam jangka pendek buruk akibatnya, juga buruk akibatnya bagi perdamaian untuk jangka panjang. Sesungguhnya kekuatan persenjataan tidak bisa menghapuskan masalah kekerasan dan perang. Sebab aktor negara tidak akan mampu memperkirakan semua kondisi yang menggiring negara-negara kepada perang (Jervis 1976, 80-82). Sekalipun begitu ide-idenya telah menjadi satu dalam tindakan para aktor dan diterima sebagai suatu yang lazim untuk menghadapi masalah-masalah keamanan.

Kydd (1997) berpendapat pengetahuan tentang sifat anarki politik internasional membuat setiap negara menjadi sangat terobsesi dengan kemampuan untuk mengamankan dirinya, yang melahirkan dilema keamanan, dimana suatu negara merasa harus menaikkan terus tingkat keamanannya karena melihat negara lain meningkatkan kemampuannya untuk mengamankan. Ini tidak hanya ditemukan pada negara-negara yang kuat. Negara-negara miskin, yang kemampuannya keuangannya sangat terbatas, tetap merasa harus mengambil tindakan yang sama, sekalipun untuk itu mereka harus berhutang. Sejumlah besar anggaran negara telah dihabiskan oleh pemerintah-pemerintah negara miskin guna meningkatkan kemampuan militer, hingga menimbulkan apa yang disebut dengan "*under-consumption*" (Hobson 2000, 77).

Untuk menghapuskan bahaya perlombaan persenjataan negara-negara telah sepakat untuk mengesahkan larangan pengembangan senjata nuklir. Kesepakatan ini dengan jelas menunjuk kepada kompetisi kekuasaan antara blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet disatu sisi dan blok Barat yang dipimpin oleh AS di sisi lain. Kompetisi ini menurun sejalan dengan keputusan Uni Soviet untuk mundur, yang diikuti dengan pengakhiran Perang Dingin di tahun 1989. Namun perlombaan persenjataan belum berakhir, sekalipun Perang Dingin telah menjadi sejarah.

Indonesia telah menyetujui perjanjian hutang senilai \$1.2 Milyar dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin pada 2007 untuk mendanai pembelian kapal selam, tank dan helikopter dari Russia. Kepala the Australian National University's Strategic and Defence Studies Centre, Hugh White, mengatakan bahwa pembelian kapal-kapal selam itu akan "menyulitkan secara signifikan" bagi rancangan kekuatan laut Australia dan hal tersebut dianggap sebagai representasi ancaman nyata bagi

Australia. Tidak diragukan Cina saat ini juga sedang membangun angkatan lautnya untuk menghadapi ancaman-ancaman baru dan kondisi politik yang berubah. Deputy Perdana Menteri Korea Utara, Ro Tu-Chol mengatakan bahwa peningkatan anggaran belanja militer penting sekali untuk memelihara kekuatan penangkal nuklir Pyongyang, dan untuk menghadapi tekanan internasional pimpinan AS agar Korea Utara meninggalkan ambisi nuklirnya.

Pembahasan diatas untuk menunjukkan bahwa kebijakan dan inisiatif perlombaan persenjataan tidak selalu terkait dengan masalah-masalah konkrit yang dihadapi oleh negara-negara. Masalah yang lebih penting dari itu adalah asumsi-asumsi mendasar yang digunakan tentang struktur negara-negara. Perjuangan untuk menghapuskan kekuasaan negara semakin besar, sejak disadari bahwa tuntutan negara-negara untuk memakai kekerasan tidak hanya diarahkan kepada negara-negara lain, tapi juga kepada rakyatnya sendiri (Held 1995, 2002; Krasner 1999). Dalam pandangan kaum pluralis, kedaulatan sesungguhnya adalah milik komunitas-komunitas. Dengan konsep ini, maka landasan keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat bukan terletak pada negara, melainkan individu-individu, sebagai jantungnya, dengan membentuk persatuan-persatuan kewargaan dan dengan memperluas pemakaian prinsip-prinsip kebebasan dan kesetaraan. Lebih dari sekedar kumpulan yang dipisahkan oleh batas-batas hukum dan wilayah secara legal, individu-individu digiring untuk memakai kekuasaan untuk mengamankan diri dan mengimbangi kekuasaan negara. Kesadaran persatuan dan solidaritas merupakan dua elemen penting yang dianjurkan guna menghubungkan mereka satu sama lain, secara lintas nasional. Dengan nilai-nilai itu hubungan individu-individu dan kelompok-kelompok dikembangkan, dan dengan nilai-nilai itu kekuasaan negara hendak ditaklukan (Habermas 1991, 2001; Linklater 1990; 1998).

Dengan besarnya tuntutan untuk mengakhiri kekuasaan negara, juga disebabkan karena perkembangan dunia dimana secara politik negara tidak lagi satu-satunya aktor yang menentukan, standar agenda penelitian dan pengajuan pendapat juga bergeser dari kekuatan militer ke kekuatan ekonomi. Susan Strange (1996) mengajukan pendapatnya bahwa pusat kekuasaan cenderung beralih dari negara ke rejim internasional. Di area ini aktor-aktor bukan negara memainkan peranan yang penting dalam menetapkan masa depan dunia. Hubungan-hubungan kekuasaan disini ditentukan bukan oleh hak-hak yang disahkan secara legal, melainkan oleh mulai dari mafia pasar yang mengancam dan hendak menghapuskan kekuasaan negara, sampai pada firma-firma dan lembaga-lembaga keuangan yang besar, yang membentuk kemitraan legal secara lintas negara, yang menjalin kerjasama-kerjasama yang basisnya wewenang-wewenang negara dan dengan cara itulah negara-negara mempertahankan kekuasaannya (Strange 1988, 23-42).

Jadi, menurut pemahaman ini kekuasaan negara tidak berarti lenyap dengan naiknya kekuasaan agen-agen non-negara yang memiliki kemampuan-kemampuan keuangan yang sangat besar dan bisa mengontrol pilihan-pilihan negara. Sebaliknya negara-negara menjadi merasa perlu untuk memelihara partisipasi mereka, untuk mendukung kekuasaan miliknya. Dalam bukunya, *The Retreat of the State: The Diffusion of Power in the World Economy* (1996), Strange juga memperingatkan bahwa globalisasi menghadirkan tiga bentuk dilema keamanan. Pertama, ekonomi dalam pengertian tidak ada kewenangan politik yang mampu mengontrol dan memerintah hubungan-hubungan dalam pasar. Kedua, lingkungan yang terdiri dari aktor-aktor pasar, dengan motif-motif keuntungan mereka mengurus sumberdaya alam, pada saat yang sama pencegahan dari kewenangan politik nyaris tidak ada. Ketiga, politik dalam bentuk kemunduran demokrasi pada struktur pemerintahan global.

Ketiga faktor ini membuka peluang bagi adanya perubahan pada teknik-teknik kekuasaan dan ekspansi, yang menekankan kepada fleksibilitas dan ketepatan aksi. Di dunia militer kita tidak benar-benar memahami apa yang menjadi taruhan sementara di dunia ekonomi lebih bisa diperkirakan, dengan benar-benar memperhatikan kemakmuran dan kesejahteraan di dalam negeri. Dalam pandangan Strange, negara bisa memiliki kontrol atas salah satu atau lebih struktur-struktur ekonomi politik internasional, yakni pengetahuan, finansial, militer dan produksi, demikian pula individu-individu dan kelompok-kelompok masyarakat. Kontrol terhadap struktur-struktur tersebut tidak secara total membuat masing-masing bisa mengontrol tatanan ekonomi politik internasional. Inilah yang memberi arti pada keseimbangan kekuasaan, yang diistilahkan oleh Strange sebagai *bargaining process*, satu rentang kemungkinan yang dapat diambil oleh para aktor yang ditetapkan berdasarkan kekuasaannya atas struktur dasar IPE.

Pembahasan di atas menunjukkan konsistensi dari politik global, juga menggambarkan dengan jelas perilaku-perilaku yang terbentuk dari pemahaman yang luas tentang sifat alami manusia, kedaulatan dan globalisasi. Konflik dan kekerasan menjadi suatu yang inheren, dimana secara keseluruhan, negara-negara, komunitas-komunitas, individu-individu beserta agen-agennya memiliki keabsahan untuk mempromosikan kepentingan dirinya sendiri (Spencer 1992, 1993; Jeong 1999). Caglar Dolek dalam *The Myth of 'Failed State' in Africa: A Question an Atomistic Social Ontology?* (2008) mengatakan doktrin kedaulatan negara telah membentuk kembali pemikiran spesifik akademisi dan para pembuat kebijakan di Barat. Mereka menganggap bahwa isu-isu kekerasan, mulai dari konflik militer, bentrokan etnik, suku dan agama, sampai pada jeratan hutang, kelaparan, kemiskinan, penyebaran penyakit menular, kerusakan lingkungan dan keterbelakangan terkait dengan masalah sifat alami manusia.

## Konflik dan Perdamaian

Pemahaman tentang globalisasi telah menjadi semakin kukuh dan dalam rentang yang luas diterima sebagai teori yang memiliki makna bagi perdamaian. Teori perdamaian demokratik (*Democratic Peace Theories*; DPTs) diletakkan disini sebagai "pemberi makna absolut" terhadap konsep-konsepnya. Titik berangkat teori-teori ini diletakkan pada asumsi bahwa demokrasi cenderung memilih damai ketimbang perang dan rejim demokratik cenderung lebih damai ketimbang rejim otoriter, walaupun mereka memilih perang, cenderung menang (Lake dan Baum 2001; Desch 2002, 2003). Asumsi yang melekat didalam teori ini adalah negara hanya akan memilih perang jika berhasil memenangkan tuntutan itu didalam negeri. Dalam sistem demokrasi ini akan sangat sulit dan meminta waktu yang lama untuk memperoleh persetujuan dari bermacam-macam kelompok politik (Held 1995). Secara demikian teori-teori *democratic peace* mengacu kepada zona atau wilayah negara-negara yang damai, yang diprediksi oleh Kant sebagai faktor perdamaian, yaitu negara-negara yang berbentuk republik liberal.

Dalam alur pemikiran Kantianisme permasalahan konflik dan perang dapat ditanggulangi dengan membentuk sistem *check and balance* di antara lembaga-lembaga pembuatan keputusan. Kant menganjurkan agar dibentuk lembaga internasional semacam republik federal di AS sebagai bentuk ideal pemerintahan internasional. Dengan pemahaman ini maka demokrasi yang diterapkan di AS juga dianggap sebagai model ideal. Belakangan teorisi perdamaian demokratik juga menganjurkan konsep kesalingtergantungan ekonomi untuk mewujudkan perdamaian internasional. Dasar pemikirannya, negara-negara yang saling tergantung secara ekonomi dan dalam lingkungan dimana keuntungan bisa didapat melalui pertukaran ekonomi, perang akan dianggap sebagai tindakan yang tidak rasional. Kesalingtergantungan ekonomi membantu untuk melahirkan perdamaian diantara negara-negara yang memakai sitem demokrasi (Barbieri dan Levy 1999).

Liberalisme umumnya meyakini globalisasi adalah sebuah keniscayaan, yang tercipta dari pencapaian-pencapaian yang tinggi dalam penerapan-penerapan teori perdamaian demokratik. Globalisasi selanjutnya, menjadi sebuah kerangka ideal untuk adanya kesalingtergantungan ekonomi dan demokrasi liberal. Kaum idealis liberalisme meyakini globalisasi akan mengubah karakter masyarakat secara fundamental. Kepentingan-kepentingan, ide-ide dan keyakinan-keyakinan yang sempit, seperti agama, etnik, ras dan ideologi akan terkubur, karena manusia menjadi makhluk-makhluk yang sepenuhnya rasional dan lebih memfokuskan perhatiannya pada usaha-usaha produktif/ekonomi. Dengan globalisasi maka karakter masyarakat akan menjadi global pula (Rupert, 2000). Teorisi neoliberalisme juga telah menunjuk struktur mana atau agen apa yang paling pantas untuk menengahi konflik-konflik yang timbul. Bentuk-bentuk konkrit dari

kekuasaan ini terdapat pada sistem perbankan dan keuangan multinasional seperti WTO, IMF dan ADB, termasuk individu-individu yang memimpin didalamnya (CEO; managerial class). Kesamaan langkah dari struktur-struktur ini dalam mempromosikan visi globalisasi, yang berkisar pada pemahaman tentang perdagangan bebas, kapitalisme dan demokrasi liberal, dan semua itu dilihat sebagai bentuk penerimaan masyarakat yang penuh kepada globalisasi (Barbieri 2005).

Sebagai sebuah proyek politik, globalisasi mengandung sejumlah masalah, terutama pada nilai-nilai dasar yang digunakan dan mekanisme yang ditunjuk untuk masuknya masyarakat-masyarakat kedalam sistem global. Masalah yang prinsip adalah kekerasan dan paksaan menjadi syarat bahkan tindakan yang diminta untuk mencapai globalisasi. Perang juga dapat dibenarkan asalkan tujuannya untuk memajukan demokrasi. Data-data statistik yang menunjukkan kemajuan perekonomian negara-negara yang tidak memakai demokrasi liberal, seperti Cina, menjadi tantangan yang berat bagi liberalisme untuk menghasilkan ketepatan dalam analisisnya. Bukti-bukti ini mengindikasikan bahwa demokrasi bukanlah sebab kemajuan-kemajuan ekonomi. Perubahan dalam sistem kelembagaan nasional tidak mesti mengubah dengan sendirinya pola pikir masyarakat dalam unit itu. Bahkan di masa kepemimpinannya, Presiden Amerika Serikat George W. Bush meyakini bahwa tindakannya memerangi negara-negara yang tidak memakai sistem demokrasi liberal sebagai tidak terpisahkan dari misi moral para pejuang Perang Salib (*crusaders*).<sup>1</sup>

Richard Hass, Penasehat Presiden Bush untuk Hubungan Luar Negeri, mengatakan Perang Irak dan perang-perang lainnya yang dilakukan atas nama kebebasan dan demokrasi sebagai sebuah pilihan yang tidak saja amat mahal tapi juga buruk (Hiarie, nd) Sekalipun demikian, ide-idenya telah dipakai oleh banyak pemimpin politik dunia. Bill Clinton dari Partai Demokrat mengatakan perdamaian demokratik sebagai strategi terbaik untuk menjamin keamanan nasional dan membangun perdamaian abadi. Bush dari Partai Republik meyakini bahwa demokrasi liberal adalah landasan pokok bagi perdamaian. Kongres Amerika Serikat menyebutkan hampir 170,000,000 manusia hilang kehidupannya akibat kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan totaliter. Mantan

---

<sup>1</sup> Menarik untuk memasukan pendapat seorang pengamat yang mengatakan bahwa George W Bush tidak kalah fundamentalisnya dibanding musuh-musuhnya Ahmadinejad (Iran) dan Osama bin Laden (Afganistan). Ini bukan karena dia penganut aliran keras agama tertentu juga bukan karena agama yang dianut memiliki paham teologis yang berbahaya bagi perdamaian dunia. Tapi lantaran menjadi nasionalis dan fundamentalis bermanfaat besar untuk hal-hal yang sekular, seperti liberalisasi ekonomi yang menguntungkan dirinya sendiri dan membahagiakan nasib kelas sosial dominan yang menjadi basis utama dukungan politiknya.

pemimpin Komisi Uni Eropa untuk hubungan luar negeri Chris Pattern mengatakan hal senada.<sup>2</sup>

### **Masyarakat Lintas Batas**

Pemahaman tentang globalisasi yang dikembangkan bersama-sama dengan teori konflik realisme dan teori perdamaian demokratik liberalisme memperkenalkan dan membentuk sejumlah pengetahuan tentang adanya masyarakat transnasional yang memiliki ciri-ciri jaringan yang kompleks secara regional maupun kultural, dimana terdapat sistem-sistem interaksi dan pertukaran yang melibatkan bermacam-macam aktor. Kedekatan hubungan-hubungan antara satu aktor nasional dengan aktor nasional yang lain mesti dilihat sebagai proses yang digerakan oleh pemahaman apapun tentang penyatuan-penyatuan masyarakat secara global. Pencapaian-pencapaiannya yang tidak penuh dan ramainya aktor-aktor yang bergerak dalam globalisasi, serta kesalingterkaitan antara satu dengan yang lainnya, membentuk jejaring-jejaring komunitas-komunitas yang kompleks; negara-negara, lembaga-lembaga internasional, organisasi-organisasi non-pemerintah dan korporasi multinasional, hingga membentuk suatu keadaan yang disebut dengan tatanan global (Tarrow 2005; Slaughter 2004; Barnett dan Finnemore 2004; Rosenau 2003).

Di bawah keadaan-keadaan ini, dan kalau benar semua yang dikatakan adalah situasi politik yang terpenting dari politik dunia saat ini, maka tidak ada keraguan aktor-aktor internasional akan menjadi semakin aktif dalam mencari dan mengumpulkan sumber-sumber kekuasaan baru bagi dirinya. Sebab, masing-masing telah melihat globalisasi sebagai suatu yang mendatangkan akibat-akibat berupa ketidakmampuan pemerintah negara untuk menjamin kemakmuran dan keamanan baginya sampai pada gagal negara. Dengan alasan yang sama, masing-masing ingin menguasai setiap sumber yang berharga untuk memperbesar kekuasaan. Kekuasaan pada gilirannya bukan lagi sekedar keharusan, tapi kebutuhan setiap individu dan agen-agennya, terlepas apakah mereka memiliki landasan yang kuat dan kearifan untuk memakai kekuasaan itu.

Paling tidak setiap agen sudah memiliki satu set pengetahuan yang mensahkan pemakaian kekuasaan, untuk melemahkan yang lain dan memperbesarnya kekuasaan dirinya, termasuk menolak dan mengubah ide-idenya. Di kawasan ASEAN sebagai contoh, telah muncul kecendrungan yang makin lama makin naik untuk mengedepankan konsep-konsep kerjasama yang pemecahan konflik yang

---

<sup>2</sup> Pendapat-pendapat ini mengacu kepada tulisan tentang *109th Congress, 1st Session, S. 516*. dimunculkan secara elektronik pada August 19, 2006.

diciptakan dari dalam strukturnya sendiri seperti "Asian democracy" dan "ASEAN way" (Khong-Foong 2000).

Reaksi ASEAN menghadirkan konstruksi-konstruksi yang berbeda tentang globalisasi, bentuk-bentuk reaksi dan akibat-akibat yang ditimbulkannya. Namun, meskipun dengan partisipasi aktif komunitas-komunitas, reaksi terhadap globalisasi selalu menghadirkan kembali nilai-nilai inti masyarakat global. Konflik Blok Ambalat, antara Indonesia dan Malaysia mengundang tanggapan yang beragam, juga memicu reaksi emosional, sebagian besar didasarkan pada dukungan terhadap kedaulatan negara. Jadi, pandangan bahwa globalisasi sebagai kondisi awal untuk sampai pada satu masyarakat dunia yang terintegrasi secara utuh dan damai adalah suatu kesalahan besar. Globalisasi mencakup pula pola-pola ketidakadilan dan hierarki, juga membentuk pola-pola keluar masuknya aktor, pemenang baru dan pecundang baru (Hurrell dan Woods 1995). Sebagaimana yang dikatakan oleh Bull and Buzan, kesalingterkaitan yang kompleks itu sendiri bisa menjadi sumber konflik yang intens, ketimbang kerjasama, juga sumber ketakutan hingga menimbulkan hasrat-hasrat yang dalam untuk mengontrolnya (Bull 1977; Buzan 1991). Semakin banyak ketakutan akan hilangnya kesempatan untuk berbagi keuntungan dan kekuasaan maka konflik-konflik dalam globalisasi juga semakin ramai dan semakin luas.

Pemahaman yang paling dasar dari struktur global adalah agen-agennya terhubung satu sama lain tidak oleh apapun, kecuali pemahaman normatifnya tentang keadilan dan struktur yang menyebabkan ketidakadilan. Prosesnya berlangsung dari jarak jauh, siapapun dapat terhubung dengan salah satunya. Kondisi yang membedakan terletak bukan pada siapa yang di atas dan di bawah, tapi insitif-inisiatif apa yang dibuat oleh masing-masing, yang mengindikasikan cara pandang dan pilihan-pilihan tindakan. Sejalan dengan pemahaman dalam globalisasi, struktur politik global tidak berbatas-batas, dan atomis. Mereka terhubung dan dimaknai sebagai struktur karena pengaruhnya dirasakan, baik oleh aktor-aktor di dalam maupun yang di luar itu. Konsep globalisasi telah memberikan gambaran yang makin lama makin kuat tentang budaya atomistik dan konflik yang berkepanjangan, yang penyelesaiannya hanya dimungkinkan melalui kekerasan dan perang.

Dengan pemahaman ini, maka interaksi yang intens dan jalinan hubungan kekuasaan yang dalam serta jejaring yang kompleks dari struktur ideasional dan normatif menjadi semakin penting, melalui pemahaman tentang tanggung-jawab, hak-hak, serta nilai-nilai diproduksi dan diproduksi kembali. Kekuasaan ini menjadi penghubung sekaligus penghalang bagi agen-agen yang meyakini nilai-nilainya. Misalnya, struktur global akan semakin memiliki kepedulian nyata kepada kemiskinan, kerusakan lingkungan, kerugian dan penderitaan yang lain, karena agen-agen yang membuat insitif dan membawa nilai-nilainya ke depan

semakin beragam-ragam dan padat. Sebagaimana yang lainnya, dalam kontribusinya untuk membentuk struktur politik yang sah, partisipasi mereka dalam memasarkan ide-idenya didasarkan pada inisiatif gabungan dan prinsip-prinsip untuk kelangsungan hidup diri sendiri. Konsekuensi dari pola interaksi ini adalah beberapa isu terkait, dan pada dasarnya merupakan kebutuhan akan situasi politik dan bagian dari dinamika global, ikut terseret kedalamnya, makin lama makin dalam. Dengan kata lain, perilaku mendukung atau menolak sangat dipengaruhi oleh inisiatif-inisiatif dan aktivitas-aktivitas komunitas-komunitas, badan-badan, agen-agen dan negara-negara. Secara akumulatif masyarakat global cenderung menggunakan pendekatan minimal kepada keadilan dan keamanan kolektif karena itu ketidakadilan yang menang.

### **Kesimpulan**

Perjalanan dunia dilihat sebagai kumpulan-kumpulan individu-individu yang tiap-tiapnya berdaulat atas hidupnya. Apakah kedudukannya di bawah atau di atas, kaya ataupun miskin, bangsawan atau rakyat jelata, memiliki hak untuk memakmurkan hidupnya. Pemahaman ini membentuk dominasi atom atas hidup, badan dan jiwa, melalui peristiwa menyelamatkan hidup. Sulit untuk dipahami tiap-tiapnya dapat menjalankan tugas melindungi hidup tanpa dilengkapi dengan alat-alat yang dapat mengerem hasrat-hasrat, ambisi-ambisi dan kehendak untuk menyelamatkan hidup. Dibandingkan dengan kekuasaan yang dijalankan secara kolektif, kekuasaan atomik mengandung satu makna simbolik, konflik dan perpecahan, yang menjurus kepada pemakaian kekerasan. Untuk melindungi hidup. Kekuasaan ini tidak mampu mengurangi resiko perang dan tentunya juga akibat-akibat yang tidak dikehendaki dari pemakaian bermacam-macam teknik kekuasaan. Dengan demikian, ia juga tidak mampu mengontrol, memodifikasi dan mengubah kekuasaan yang membentuk dan mengendalikan ruang gerak, energi politik, ekonomi, termasuk ilmu pengetahuan yang dibutuhkan.

Setiap struktur material (tindakan manusia) pada dasarnya berasal dari struktur ideasional dan normatif yang membawa pengaruh kepada apa yang diterima dan dijalankan oleh orang-orang dalam rentang yang banyak dan luas. Semua itu adalah hasil dari interaksi yang kompleks dan hubungan kekuasaan serta pertukaran ide-ide yang berkelanjutan sepanjang garis global. Akan sangat berbahaya jika kekuasaan dibayangkan hanya sebagai sebuah jaringan ekonomi, wadah integrasi komunitas, penerapan hukum-hukum universal dan pembagian-pembagian keuntungan rasional belaka. Kekuasaan global harus dipahami sebagai kekuasaan normatif, jejaring kekuasaan yang kompleks, yang mampu mengerem, mengubah atau memperbaharui ide-ide, nilai-nilai, dan aturan-aturan main didalam. Alat kekuasaannya yang terpenting adalah kemunculan jejaring yang makin lama makin ramai dan padat, hingga menciptakan tekanan yang kuat

untuk munculnya regim global yang mendeklarasikan bahwa nilai-nilai itulah yang dapat diterima dan dijalankan oleh masyarakat global.

Yang dipermasalahkan dari keberadaan struktur politik global bukanlah terletak pada bentuk-bentuk luarnya, melainkan isi di dalam, berupa ide-ide, nilai-nilai dan aturan-aturan main yang membentuk dan dibentuk oleh para aktornya. Hal itu terletak pada pola pikir manusia-manusia yang hidup dengannya. Kekuasaan dalam pemahaman globalisasi disituasikan dan dilaksanakan oleh bermacam-macam agen, kelompok, badan, sampai individu dan terjadi di berbagai tingkat kehidupan. Kekuasaan dikelola dan dijalankan tidak hanya oleh orang-orang yang memiliki pemahaman yang luas tentang pola-pola kesalingterkaitan, yang menuntut syarat kearifan, tetapi juga oleh mereka yang tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman itu, termasuk para mafia dan pecundang, semua yang mempercayai bahwa dirinya berdaulat dan berkuasa atas hidupnya sendiri. Maka, setiap penilaian tentang tantangan abad 21 mesti melihat kepada elemen gabungan yang membuka peluang untuk perubahan dan penolakan kepada nilai-nilai itu. Pendapat ini sekaligus menyediakan tantangan penelitian yang menarik, siapa yang akan menang dan kalah dalam pertarungan itu.

## **Daftar Putaka**

### **Buku dan Artikel dalam Buku**

- Barbieri, Katherine, 2005. *The Liberal Illusion: Does Trade Promote Peace?*. AnnArbor: University of Michigan Press.
- Barnett, Michael dan Martha Finnemore, 2004. *Rules for the World: International Organizations in Global Politics*. Ithaca, New York: Cornell University Press.
- Bull, Hedley, 1977. *The Anarchical Society. A Study of Order in World Politics*. New York: Palgrave Macmillan.
- Buzan, Barry, 1991. *People, State and Fear*. London: Lynne Rienner Publisher Inc.
- Buzan, Barry, 2004. *From International to World Society*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Chan, S, dan C. Moore, 2006. *Theories of International Relations*. Vol. II. Sage Publications.

- Gilpin, Robert, 1981. *War and Change in World Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Habermas, Juergen, 2001. *The Postnational Constellation*, London: Polity Press.
- \_\_\_\_\_, 1991. *The Philosophical Discourse of Modernity*. terj Frederick G. Lawrence. Cambridge: MIT Press.
- Held, David, 1995. *Democracy and Global Order: From Modern State to Cosmopolitan Governance*. Cambridge: Politi Press.
- \_\_\_\_\_, 2002. *Cosmopolitanism: Ideas, Realities, Deficits*, dalam David Held dan A. McGrew (eds.). *Governing Globalisation*. Cambridge: Polity.
- Hobson, John M., 2000. *The State and International Relations*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hoffman, P., 1999. *Freedom, Equality, Power: the Ontological Consequences of the Political Philosophies of Hobbes, Locke, and Rousseau*. New York: Peter Lang.
- Jervis, Robert, 1976. *Perception and Misperception in International Politics* Princeton: Princeton University Press.
- Jeong, Ho-Won, ed. 1999. *The New Agenda for Peace Research*. Vermont, Brookfield: Ashgate Publishing Company.
- Krasner, S.D., 1999. *Sovereignty: Organized Hyprocracy*. Princeton, New York: Princeton University Press.
- Linklater, Andrew, 1998. *The Transformation of Political Community*. Columbia: University of South Carolina Press.
- \_\_\_\_\_, 1990. *Men and Citizens in the Theory of International Relations*, Edisi 2. Princeton, New Jersey: Prinecton University Press.
- Mearsheimer, John J., 2001. *The Tragedy of Great Power Politics*. New York: Norton.
- Morgenthau, Hans J., 1948/1985. *Politics among Nations, The Struggle for Power and Peace*. New York: Alfred Knopf.

Rosenau, James N. 2003. *Distant Proximities: Dynamics beyond Globalization*. Princeton: Princeton University Press.

Rupert, Mark, 2000. *Ideologies of Globalization: Contending Visions of a New World Order*. London: Routledge.

Slaughter, Anne-Marie, 2004. *A New World Order*. Princeton: Princeton University Press.

Strange, Susan, 1996. *The Retreat of the State. The Diffusion of Power in the World Economy*. Cambridge: Cambridge University Press.

\_\_\_\_\_, 1988. *States and Markets*. London: Pinter Publishers.

Tarrow, Sidney, 2005. *The New Transnational Activism*. New York: Cambridge University Press.

Waltz, Kenneth N., 1979. *Theories of Internasional Relations*. London: McGraw-Hill.

### **Artikel dalam Jurnal**

Barbieri, Katherine dan Jack Levy, 1999. "Sleeping with the Enemy: The Impact of War on Trade", dalam *Journal of Peace Research*, **36**(4): 463-479.

Desch, Michael C., 2002. "Democracy and Victory: Why Regime Type Hardly Matters", dalam *International Security*, Fall, **27** (2): 5-47.

\_\_\_\_\_, 2003. "Democracy and Victory: Fair Fights or Food Fights?", dalam *International Security*, Summer, **28** (1): 180-194.

Hurrel. Andrew, dan N. Woods, 1995. "Globalization and Inequality", dalam *Millennium Journal of International Studies*, **24** (3): 427-440.

Krasner, Stephen D., 1988. "Sovereignty: An Institutional Perspective", dalam *Comparative Political Studies*, **21**: 66-94.

Kydd, A., 1997. "Sheep in Sheep's Clothing: Why Security Seekers do not Fight Each Other", dalam *Security Studies*, **7** (1): 114-155.

Lake, David A, dan M.A. Baum, 2001. "The Invisible Hand of Democracy: Political Control and the Provision of Public Services", dalam *Comparative Political Studies*, August, **34** (6): 587-621.

Spencer, D. E. dan W.J. Spencer, 1992. "The International Negotiation Network: A New Method of Approaching Some Very Old Problems", *Occasional Paper Series*, **II** (2).

Spencer, D. E. dan W.J. Spencer, 1993. "Resolving Intra-National Conflicts: A Strengthened Role for Intergovernmental Organizations" *Conference Report Series*, **5** (1).

### **Artikel Online**

Dolek, C., 2008. The Myth of 'Failed State' in Africa: A Question on Atomic Social Ontology?. [online]. *Jurnal of Turkish Weekly*. 29 April, dalam Global Policy Forum, New York. [gpf@globalpolicy.org](mailto:gpf@globalpolicy.org).

Hiarie, Eric, n.d. Formasi Negara Neoliberal dan Kebangkitan Komunalisme. [online] dalam [www.mandatory4\\_eric.htm](http://www.mandatory4_eric.htm) (diakses 22 Juli 2009).

Yuen, Khong-Foong, 2000. Globalisation of Liberalism and Realism: Responses From Southeast Asia. [online]. *The Malaysian Journal of Economic Studies*, Jun-Dec, dalam [http://findarticles.com/p/articles/mi\\_qa5520/is200006/ai\\_n2146529](http://findarticles.com/p/articles/mi_qa5520/is200006/ai_n2146529) (diakses 22 Juli 2009).